



RESPONS KELUHAN PENGUSAHA MALIOBORO

PKL Tak Tertib Langsung Ditindak

DANUREJAN (MERAPI) - Komunitas pedagang kaki lima (PKL) Malioboro membantah ada lapak dagangan yang menghalangi akses masuk toko. Selama ini luasan dan ketinggian lapak sudah diatur dalam peraturan walikota serta mendapat persetujuan dari pemilik toko.

Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pamalni) yang menempel di toko sisi barat Malioboro, Slamet Santoso menjelaskan, kebanyakan komplain dari pengelola toko karena masih terdapat PKL yang menutup akses masuk toko. Pihaknya sudah koordinasi dengan semua PKL di lapangan agar untuk masuk ke toko dibuat semaksimal mungkin.

"Kalau ada PKL di depan toko yang melanggar melebihi batas, langsung ditegur dan kami potong luasannya sesuai kesepakatan bersama dengan pemilik toko," kata Slamet, Selasa (4/9).

Pernyataan itu menanggapi keluhan sejumlah pengusaha di Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PP-MAY). Pihaknya juga membantah ada jual beli maupun sewa lapak PKL Malioboro. Menurut Slamet, yang selama ini terjadi hanya perpindahan nama pengguna lapak. Misalnya ada pedagang anggota Pamalni yang meninggal dunia maka yang meneruskan ahli warisnya yakni anaknya. Perpindahan lapak itu juga disertai bukti akta kematian dan kartu keluarga. Pamalni, lanjutnya, beranggotakan 444 PKL.

"Tidak ada. Sewa menyewa juga tidak ada. Tapi mungkin sifatnya kerja sama (yang nunggu lapak) orang lain. Ada kasus orang yang menyewa toko, lalu di depan toko suruh orang berjualan. Pedagang yang jualan di depan toko itu bayar ke penyewa toko," terangnya.

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua Paguyuban Koperasi PKL Tri Dharma, Paul Zulkarnain. Menurutnya, luasan dan ketinggian lapak PKL sudah diatur. Misalnya lebar maksimal 1,5 meter, ketinggian 1,25 meter dan akses masuk ke toko 90 cm.

"Tidak ada yang dijualbelikan atau disewa. Adanya pelimpahan. Misalnya ada anggota yang mau usaha ke tempat atau daerah lain, maka dilimpahkan ke yang lain. Atau pedagang sudah tua dilimpahkan ke anaknya. Kami perbarui datanya dan serahkan ke pemkot," tutur Paul.

Dia menyebut jumlah anggota koperasi PKL Tri Dharma ada sekitar 1.300 orang tapi yang memiliki lapak berjualan di Malioboro sekitar 800 orang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat



MERAPI-TRI DARMIYATI

Sejumlah becak mangkal di jalur lambat Jalan Malioboro yang hingga kini masih direvitalisasi menuju semi pedestrian.

Mereka berjualan di sisi barat depan toko tapi tidak menempel di toko dari utara Malioboro sampai Ngejaman.

"Kami *welcome* apapun keinginan toko yang penting komunikasi. Sama-sama duduk bersama," ujarnya menanggapi usulan pengusaha terkait akses masuk minimal sepertiga dari lebar toko.

Sementara itu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Ekwanto menyampaikan, luasan lapak PKL di Malioboro

telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani. Luasan lapak dan ketinggian tiap PKL berbeda-beda tergantung lokasi PKL. Dia menuturkan para PKL dua minggu lalu sudah mendeklarasikan untuk peduli bersih siap menata diri karena berkomitmen menginginkan Malioboro lebih tertata.

"Menata diri itu misalnya lapak PKL tidak melebar *sak*

karepe dewe (semaunya sendiri). Dengan komitmen itu kami akan lihat di lapangan bagaimana, sehingga toko, PKL dan pembeli semua bisa nyaman," ucap Ekwanto.

Pihaknya juga tidak mengetahui adanya jua beli maupun sewa lapak PKL Malioboro. Dalam Perwal tersebut sudah diatur larangan memperjualbelikan lokasi PKL itu. Secara sertifikat lahan lokasi berjualan PKL adalah persil toko.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005